

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Ali, Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Apeldoorn, L. J. van. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Cst Kansil, Christine, S. T. Kansil, Engelien R. Palandeng, dan Godlieb N. Mamahit. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah. *Petunjuk Teknis Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah*. Nomor 01/JUKNIS/DJ-VII/2018, Jakarta: Kementerian ATR/BPN, 2018.
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Harsono, Boedi. 2002. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Jambatan.
- Kelsen, Hans. 2005. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara, terj. Raisul Muttaqien*. Bandung: Nusa Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Michiel Otto, Jan. 2013. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang (terjemahan Tristam)*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Perangin, Effendy. 2005. *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutaryono, dkk. 2021. *Problematika Pengelolaan Pertanahan Di Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press.

Sutedi, Andrian. 2011. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, cet. 1*. Jakarta: Balai Pustaka.

Wijayanti, Asri. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zamaludin Ali. 2016. *Metode Penelitian*, Cetakan ke-7. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sertifikat Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1966 mengenai Hak Guna Usaha

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

C. Jurnal Ilmiah

Adinegoro, Kurnia Rheza Randy. 2023. "Analisis Transformasi Digital Layanan Publik Pertanahan: Hak Tanggungan Elektronik pada Kementerian ATR/BPN." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 19 No. 1.

Ahadiyat, Rahmat, Hartanto, dan Saefullah. 2025. "Tindak Pidana Bidang Tanah secara Terorganisir yang Dilakukan oleh Mafia Tanah dalam Memalsukan Akta Otentik." *Yustisi: Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 2.

- Aktiva, G. T., U. Dinata, A. I. Shaleh, F. Az Zahra, A. Ambarwati, dan M. Putri. 2023. "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Pada Badan Pertanahan Nasional." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5 No. 3.
- Alimuddin, N. H. 2021. "Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia." *Jurnal SASI*, Vol. 27 No. 3, 335–345.
- Androvaga, R. T. "Problematika Transformasi Sertifikasi Tanah Digital." *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, Vol. 1 No. 1.
- Arifin, Syamsul. 2012. "Pengantar Hukum Indonesia". Medan: Medan Area University Press.
- Ariyanto. 2017. "Perolehan Hak Atas Tanah Secara Originair dan Derivatif dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1
- Bahari, Syaiful, Muhammad Panca P. Mustaqim, La Ode Mbunai, dan Zahra Malinda Putri. 2025. "Rekonstruksi Pemaknaan Hak Menguasai Negara menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945." *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law*, Vol.2 No.1
- Dewi, R. A. R. M., dan C. Susantio. 2024. "Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk Meningkatkan Efisiensi Pendaftaran Tanah dalam Upaya Pencegahan Mafia Tanah." *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 5 No. 9.
- Endeng. 2019. "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang." *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 4 No. 1.
- Erycha, F. D. P., dan Agus Supriyo. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Sertifikat Tanah Elektronik." *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 8 No. 2.
- Hadisiswati, Indri. 2014. "Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah." *Jurnal Ahkam*, Vol. 2 No. 1.
- Hidayat, A. 2024. "Tahapan Administratif Sertifikat Tanah Elektronik di Lingkup ATR/BPN". *Jurnal Akta*. Vol. 11. No. 2.
- Inneke Widyawati, Tito. 2016. "Pengendalian Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang." *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 13 No. 2.
- Ismail, I Made Sepud. 2016. "Aspek Pidana Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah." *Jurnal Notariil*, Vol. 1 No. 1.

- Kambey, J., J. Korua, dan M. S. Karundeng. 2025. "Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Memberantas Mafia Sertifikat Ganda di Sulawesi Utara." *Lex Privatum*, Vol. 15 No. 4.
- Karlina, Yunawati. 2022. "Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Res Justitia*, Vol. 2 No. 1.
- Kartika Widyaningsih, Budi Santoso, dan Mujiono Hafidh. 2015. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali melalui Program Nasional Agraria (PRONA) di Kantor Pertanahan Jakarta Barat." *Jurnal Notarius*, Vol. 12 No. 2.
- Laksono, V. C. A. 2025. "Mafia Tanah dan Sengketa Agraria: Peran Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik dalam Perlindungan Hukum". *Jurnal Notary Law*. Vol.1 No.1.
- Muhammad, Rachman, dan Hastri. 2021. "Problematika Penerbitan Sertifikat Pengganti Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar." *Rechtmatig: Jurnal Hukum Tata Negara*.
- Permana, Putra, Panca O. Hadi, Iskandar Muda, Mohammad Ryan Bakry, Chandra Yusuf, dan Irwan Santosa. 2025. "A Framework for Integrated E-notary Services Based on Blockchain for Civil Law Notaries: The Case of Indonesia." *International Journal on Informatics Visualization*, Vol. 9 No. 1: 153–162.
- Putri, C. A., dan Gunarto. 2018. "Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah." *Jurnal Akta*, Vol. 5 No. 1.
- Putri, Yola Amanda, et al. 2022. "Inovasi Pelayanan Informasi melalui Aplikasi Sentuh Tanahku pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara". *Journal of Social and Policy Issue*. Vol. 2. No. 2.
- Rachman, F. M. dan Wibowo, T. M. 2022. "Perlindungan Hukum terhadap Sertifikat Tanah Elektronik dengan Sistem Tanda Tangan Digital". *Jurnal Lex Renaissance*. Vol. 7. No. 3.
- Ramadhani, D. 2023. "Aspek Kepastian Hukum dalam Sertifikat Tanah Elektronik di Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding*. Vol. 12. No. 1.
- Ramdhan, F. 2022. "Implikasi Sertifikat Elektronik dalam Peralihan Hak Atas Tanah." *Jurnal Agraria*, Vol. 8 No. 2.
- Ratmin, T., A. Laturette, dan P. Radjawane. 2023. "Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Elektronik Hak Atas Tanah Pada Perkara Perdata Di Pengadilan." *Jurnal Plasrev, Universitas Pattimura*, Vol. 1 No. 2.

- Rustam, Muhammad. 2016. "Pengantar Pengelolaan Arsip Elektronik". Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sahnan, E. Suharsono dan Ardi Gunardi. 2019. "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 7. No. 3.
- Santoso, Iwan Ahmad Puji. 2025. "Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan." *Jurnal Pariwisata & Administrasi (PAR)*, Vol. 2 No. 3.
- Sasongko, Wahyu. 2007. "Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen". Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sefni, S. M., Jemmy S., dan Olga P. 2024. "Proses Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Peran BPN Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan." *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 12 No. 5.
- Silviana, A. 2024. "Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Sebagai Pembuktian di Pengadilan." *Jurnal Notarius*, Vol. 17 No. 3.
- Sumardani, Ni Made Rian Ayu, dan I Nyoman Bagiastra. 2021. "Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional Terkait Ketidaksesuaian Hasil Pengecekan Sertifikat Elektronik." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6 No. 2.
- Supardy Marbun. 2020. "Mencari Bentuk Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah." *Jurnal Pertanahan*. Vol. 10. No. 2.
- Tim Peneliti Universitas Halu Oleo (UHO). 2023. "Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Indonesia." *Jurnal Publik UHO*.
- Widiastuti, Anita, dan Bakti Setiawan. 2010. "Masalah Pertanahan dan Pembangunan Kota di Kota Administrasi Jakarta Utara." Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Windy, W., dan K. Shelly. 2022. "Aspek Kepastian Hukum Dalam Hal Penggantian Sertipikat Menjadi Sertipikat Elektronik (Sertipikat-El)." *Lex Jurnalica*, Vol. 19 No. 2.
- Yani, A., dan R. A. Syafiin. 2021. "Pengarsipan Elektronik Sertifikat Tanah untuk Menjamin Ketersediaan Arsip sebagai Alat Bukti yang Sah pada Sengketa Pertanahan." *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, Vol. 14 No. 1.

D. Internet (Web)

- Antara News. (2024, 31 Oktober). “Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Ingin Mafia Tanah Dimiskinkan”. Diakses pada 19 Februari 2025, pukul 10.19 WIB, dari <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/437381/menteri-atr-bpn-nusron-wahid-ingin-mafia-tanah-dimiskinkan>
- Avisena, M. Ilham Ramadhan. (2021, 21 November). “Marak Mafia Tanah, Masyarakat Harus Pahami Prosedural Agraria. Media Indonesia.” Diakses dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/448479/marak-mafia-tanah-masyarakat-harus-pahami-prosedural-agraria>
- Good News From Indonesia. (2018, 23 Januari). “Penerapan Sistem E-Government di Indonesia.” Diakses pada 19 Februari 2025, pukul 10.29 WIB, dari <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/01/23/penerapan-sistem-e-government-di-indonesia>
- Grehenson, G. (2020, 12 Februari). “Sertifikat Elektronik Mempermudah Warga Urus Hak Kepemilikan Atas Tanah”. Universitas Gadjah Mada. Diakses pada 19 Februari 2025, pukul 10.32 WIB, dari <https://www.ugm.ac.id/id/berita/20722-sertifikat-elektronik-mempermudah-warga-urus-hak-kepemilikan-atas-tanah>
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2024, Oktober). “Survei IKM-IPK Oktober 2024: Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Anti Korupsi.” Diakses pada 19 Februari 2025, dari <https://csms.atrbpn.go.id/survey/dashboard/infographic/e87be952-7f99-11ef-a550-303930373237/3ff48bda-4b87-11eb-a51f-323334333033>
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. “Kenali Mafia Tanah dan Cara Melindungi Hak Anda.” Diakses pada 19 Februari 2025, pukul 10.16 WIB, dari <https://sultra.atrbpn.go.id/berita/kenali-mafia-tanah-dan-cara-melindungi-hak-anda>
- Media Patriot. (2023, 21 Juli). “Kepala Kantor Pertanahan Nasional Jakarta Utara Bapak Taufik Mendapat Pujian dari Warga Masyarakat Semper Barat Atas Kinerjanya Menyelesaikan Program Pemerintah PTSL.” Diakses pada 19 Februari 2025, dari <https://www.mediapatriot.co.id/2023/07/21/kepala-kantor-pertanahan-nasional-jakarta-utara-bapak-taufik-mendapat-pujian-dari-warga-masyarakat-semper-barat-atas-kinerjanya-menyelesaikan-program-pemerintah-ptsl/>
- Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. “Sejarah Jakarta Utara.” Diakses pada 18 Februari 2025, pukul 20.29 WIB, dari <https://utara.jakarta.go.id/artikel/sejarah-jakarta-utara>
- Rahma, T. N. (2020, 19 Februari). “Waspada, Begini Ragam Modus Operandi Mafia Tanah.” Tempo.co. Diakses pada 19 Februari 2025, pukul 10.13 WIB, dari <https://bisnis.tempo.co/read/1312396/waspada-begini-ragam-modus-operandi-mafia-tanah>

- Sukoyo, Y. (2018, 5 Maret). "Ini Penyebab Mafia Tanah Tetap Marak." BeritaSatu.com. Diakses pada 19 Februari 2025, pukul 10.19 WIB, dari <https://www.beritasatu.com/nasional/509190/ini-penyebab-masih-mafia-tanah-tetap-marak>
- Tysara, L. (2021, 13 Februari). "Cara Mengurus Sertifikat Tanah Elektronik: Begini Proses Mendaftar dan Menggantinya." Liputan6.com. Diakses pada 19 Februari 2025, pukul 10.37 WIB, dari <https://www.liputan6.com/hot/read/4482007/cara-mengurus-sertifikat-tanah-elektronik-begini-proses-mendaftar-dan-menggantinya>
- Universitas Diponegoro. "Repositori Institusi Universitas Diponegoro." Diakses pada 16 April 2025, dari <http://eprints.undip.ac.id/>

MUHAMMAD RAFI_2202023015_TESIS.docx

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

21%
INTERNET SOURCES

6%
PUBLICATIONS

9%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	juridica.ugr.ac.id Internet Source	3%
2	journal.fh.unsri.ac.id Internet Source	2%
3	repository.unibos.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	2%
5	123dok.com Internet Source	2%
6	repository.ugr.ac.id:1015 Internet Source	1%
7	jurnal.uns.ac.id Internet Source	1%
8	ojs.rewangrencang.com Internet Source	1%
9	repository.unbari.ac.id Internet Source	1%